

Biodiversity

Ringkasan inti:

Kajian biodiversitas dan karbon kawasan membantu perusahaan memahami nilai ekologis dan fungsi penyerapan karbon di area operasional maupun area konservasi. Output utama mencakup peta tutupan lahan, zonasi konservasi, estimasi cadangan dan serapan karbon tahunan, serta inventarisasi spesies (termasuk status konservasi dan peran ekologis).

Untuk memastikan hasil dapat dipertanggungjawabkan, metodologi umumnya merujuk pada standar klasifikasi tutupan lahan, prosedur pengukuran cadangan karbon berbasis plot, pedoman perhitungan serapan/emisi sektor kehutanan, serta kerangka regulasi konservasi terbaru di Indonesia.



Kajian potensi biodiversitas dan serapan karbon, peta spasial tutupan lahan, zonasi konservasi dan potensi cadangan karbon, estimasi kuantitatif penyerapan karbon tahunan, serta daftar spesies flora-fauna beserta status konservasi dan peran ekologisnya.

1. Keputusan Menteri LHK tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Regulation/Standard: KepmenLHK No. SK.1027/MENLHK.PHL/KUM.1/9/2023

Title (ID): Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

Date (ditetapkan): 22 September 2023

Summary:

Keputusan ini menetapkan peta jalan sebagai acuan arah, tahapan, dan ruang lingkup pengembangan perdagangan karbon sektor kehutanan. Dokumen ini membantu menyelaraskan perencanaan program karbon berbasis kehutanan dengan target pengendalian emisi nasional, termasuk fokus subsektor kehutanan serta pengelolaan gambut dan mangrove sesuai konteks implementasi yang ditetapkan.

[LINK REGULASI](#)

2. Petunjuk Teknis Plot Sampel Permanen (PSP) Karbon Hutan untuk Kegiatan FCPF

Regulation/Standard: Petunjuk Teknis Pembangunan Plot Sampel Permanen (PSP) Karbon Hutan dalam kegiatan *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF) di Indonesia – Puslitbang Sosial Ekonomi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Title (ID): Petunjuk Teknis Pembangunan PSP Karbon Hutan (FCPF Indonesia)

Date (rujukan publikasi): 2016

Summary:

Dokumen ini memberi panduan teknis penetapan dan pembangunan PSP untuk pengukuran karbon hutan, termasuk rancangan plot, pencatatan parameter lapangan, serta tata kelola data agar hasil pengukuran konsisten. Rujukan ini sering dipakai untuk memastikan desain sampling dan prosedur lapangan dapat mendukung estimasi stok karbon yang stabil dari waktu ke waktu.

[LINK REGULASI](#)

3. SOP Pengukuran & Perhitungan Stok Karbon di Kawasan Konservasi

Regulation/Standard: Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk Pengukuran dan Perhitungan Stok Karbon di Kawasan Konservasi – Pusat Litbang Perubahan Iklim & Kebijakan, Badan Litbang Kehutanan

Title (ID): SOP Pengukuran dan Perhitungan Stok Karbon di Kawasan Konservasi

Date (rujukan publikasi): 2011

Summary:

SOP ini mengatur langkah pengukuran dan perhitungan stok karbon pada kawasan konservasi secara terstandardisasi, mulai dari pengambilan data lapangan, pengolahan biomassa, hingga penghitungan cadangan karbon. Dokumen ini membantu menjaga konsistensi antar-tim dan meningkatkan keterlacakkan (*traceability*) data saat hasil dipakai untuk pelaporan atau evaluasi program konservasi.

[LINK REGULASI](#)

4. SNI Klasifikasi Penutup Lahan

Regulation/Standard: SNI 7645-1:2014 (Konfirmasi 2020)

Title (ID): Klasifikasi Penutup Lahan – Bagian 1: Skala kecil dan menengah

Date (penetapan konfirmasi): 23 Oktober 2020 (SK: 498/KEP/BSN/10/2020)

Summary:

Standar ini menjadi rujukan untuk menyusun klasifikasi penutup lahan pada skala kecil-menengah sehingga analisis spasial (pemetaan tutupan lahan) memiliki struktur kategori yang konsisten. Dalam kajian biodiversitas dan karbon, standar ini membantu menyamakan definisi kelas tutupan lahan yang dipakai dalam pemodelan, zonasi, dan interpretasi perubahan tutupan.

[LINK REGULASI](#)

5. SNI Metode Perhitungan Perubahan Tutupan Hutan dari Citra Optik

Regulation/Standard: SNI 8033:2014

Title (ID): Metode penghitungan perubahan tutupan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra penginderaan jauh optik secara visual

Date (penetapan): 24 Juni 2014 (SK: 119/KEP/BSN/06/2014)

Summary:

Standar ini menetapkan cara menghitung perubahan tutupan hutan melalui interpretasi visual citra penginderaan jauh optik. Rujukan ini berguna saat kajian membutuhkan pembuktian perubahan tutupan hutan yang transparan, termasuk penentuan kelas perubahan, aturan interpretasi, dan konsistensi penafsiran antar-operator.

[LINK REGULASI](#)

6. SNI Pengukuran Cadangan Karbon Hutan (Ground Based)

Regulation/Standard: SNI 7724:2011

Title (ID): Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (*ground based forest carbon accounting*)

Date (penetapan): 18 November 2011 (SK: 187/KEP/BSN/11/2011)

Summary:

Standar ini memandu pengukuran lapangan untuk menaksir cadangan karbon hutan berbasis data aktual, termasuk parameter pohon/tegakan dan ketentuan perhitungan yang umum dipakai pada inventarisasi karbon. Rujukan ini membantu menyusun estimasi cadangan karbon yang konsisten dan dapat ditelusuri dari data lapangan.

[LINK REGULASI](#)

7. SNI Pengukuran Cadangan Karbon Berbasis Lahan (Land Based)

Regulation/Standard: SNI 7724:2019

Title (ID): Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (*land-based forest carbon accounting*)

Date (penetapan): 7 Februari 2019 (SK: 15/KEP/BSN/2/2019)

Summary:

Standar ini memperkuat pendekatan pengukuran cadangan karbon berbasis lahan dengan cakupan metodologi yang lebih komprehensif. Dalam praktik kajian, rujukan ini membantu memastikan konsistensi desain sampling, parameter yang diukur, serta aturan konversi yang digunakan untuk menaksir cadangan karbon pada berbagai tipe tutupan/ekosistem.

[LINK REGULASI](#)

8. SNI Persamaan Alometrik Biomassa Pohon

Regulation/Standard: SNI 7725:2019

Title (ID): Penyusunan persamaan alometrik biomassa pohon untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan berdasar pengukuran lapangan (*land based carbon accounting*)

Date (penetapan): 7 Februari 2019 (SK: 17/KEP/BSN/2/2019)

Summary:

Standar ini mengatur penyusunan persamaan alometrik untuk menduga biomassa pohon dari parameter lapangan (misalnya diameter/tinggi), sehingga estimasi cadangan karbon bisa dilakukan secara terukur dan konsisten. Rujukan ini penting ketika kajian memerlukan persamaan lokal/spesifik yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tipe vegetasi tertentu.

[LINK REGULASI](#)

9. Standar Penghitungan Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan untuk Indonesia FOLU Net Sink 2030

Regulation/Standard: Standar Penghitungan Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca untuk Pelaksanaan Indonesia FOLU Net Sink 2030 – BSILHK

Title (ID): Standar Penghitungan Penurunan Emisi dan/atau Peningkatan Serapan GRK untuk Pelaksanaan Indonesia FOLU Net Sink 2030

Date (rujukan publikasi): 2023

Summary:

Standar ini menjadi acuan cara menghitung penurunan emisi dan peningkatan serapan GRK sektor kehutanan dan lahan untuk kebutuhan pelaksanaan FOLU Net Sink 2030. Rujukan ini membantu menyeragamkan asumsi dan kerangka hitung agar hasil perhitungan dapat dipakai untuk pelaporan program, evaluasi kinerja, maupun kebutuhan pengembangan aktivitas karbon berbasis lahan.

[LINK REGULASI](#)

10. Panduan Teknis Pendugaan Cadangan Karbon Hutan

Regulation/Standard: Teknis Pendugaan Cadangan Karbon Hutan

Title (ID): Teknis Pendugaan Cadangan Karbon Hutan

Date (rujukan publikasi): 2011

Summary:

Dokumen teknis ini memberi panduan praktis untuk melakukan estimasi cadangan karbon hutan, termasuk pemilihan pendekatan lapangan dan pengolahan data agar estimasi cadangan karbon dapat disusun secara sistematis. Rujukan ini sering digunakan sebagai referensi teknis untuk memperjelas langkah kerja dan kebutuhan data pada kegiatan inventarisasi karbon.

[LINK REGULASI](#)

11. Undang-Undang Konservasi Terbaru (Perubahan UU 5/1990)

Regulation/Standard: UU No. 32 Tahun 2024

Title (ID): Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Date (tahun): 2024

Summary:

Undang-undang ini memperbarui kerangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia, termasuk penguatan peran pemerintah, pendanaan, dan ketentuan pendukung pelaksanaan konservasi. Dalam konteks kajian biodiversitas, rujukan ini penting untuk memastikan rekomendasi zonasi, pengelolaan kawasan, dan perlindungan spesies selaras dengan kerangka hukum konservasi yang berlaku.

[LINK REGULASI](#)



Ingin tahu seputar Enthalphy?



Akses Company Profile kami untuk informasi lebih lanjut seputar layanan kami dan apa yang bisa kami bantu untuk perusahaan anda.

[Download di sini!](#)



PT Enthalphy Environenergy Consulting

- 🌐 www.enthalphy.com
- 📍 Jl. Tegal Melati, Jongkang, Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
- 📞 +62 821 6174 1128
- ✉️ contact@enthalphy.com

